



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SYIAH KUALA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUSTANIR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KEWIRAUSAHAAN
3. NHK : 109175

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **892.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/128 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN Rp. 13.000.000
2. Tanah Seluas 788 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
3. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. Tanah Seluas 2.247 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 341.500.000
5. Tanah Seluas 1.878 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 59.500.000
8. Tanah Seluas 2.894 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 27.500.000
9. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 29.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **125.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 125.911.399

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.144.411.399

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.144.411.399

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.